



LAMPUNG SAI

JULI 2021

EDISI 7

TOPIK UTAMA

- Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

LIPUTANKHUSUS

- Kanwil Lampung Sebar 880 Paket Bantuan Sosial di 5 Wilayah Kabupaten/Kota





5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**



icare

e|gov

REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA

WAYS THE BEST



Sekapur Sirih



Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Tabik pun...

Puji dan syukur marilah kita senantiasa sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bekerja dan berkontribusi untuk negara..

Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran

Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial "Kumham Peduli, Kumham Berbagi", mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19.

Semoga dengan adanya Kumham Peduli, Kumham Berbagi ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Salam Pembaharuan!



PELINDUNG

Plt. Kepala Kantor Wilayah
IDA ASEP SOMARA

PENGARAH

Kepala Divisi Administrasi
IDA ASEP SOMARA

Kepala Divisi Yankum dan HAM
NUR ICHWAN

Kepala Divisi Keimigrasian
IS EDY EKOPUTRANTO

Kepala Divisi Pemasaryakatan
FARID JUNAEDI

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Program dan Humas
BASNAMARA

PEMIMPIN REDAKSI

Kasubag Humas RB & TI
ARLISA NOVIRIANTONO

EDITOR

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

FOTOGRAFER, REDAKSI DAN BERITA

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

LAYOUT & DESAIN GRAFIS

NABIL AN NAFIS

Dari Redaksi



Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai Menyampaikan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kami dapat menerbitkan E-Buletin Lampung Sai edisi ke-7 ini dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

Pada edisi E-Buletin yang ke-7 ini, kami telah merangkum kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan Unit Pelaksana Teknis selama satu bulan terakhir. Khusus dalam edisi ini, kami menyajikan liputan mengenai Kumham Peduli, Kumham Berbagi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai. Kanwil Lampung turut berpartisipasi dengan menyalurkan 880 Paket Bantuan Sosial di 5 Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan agar E-Buletin Lampung Sai lebih baik lagi. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!

Tim Redaksi.





19

Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

22

Kanwil Lampung Sebar 880 Paket Bantuan Sosial di 5 Wilayah Kabupaten/Kota



07

Plt. Kakanwil Lampung Resmi Membuka Giat Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2021

09

Tim Divisi Keimigrasian Lakukan Pembinaan Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian

10

Tim Divisi Keimigrasian Lakukan Penyelidikan dan Intelijen Keimigrasian Pada Wilayah Kerja Kanim Kotabumi

11

Kanwil Lampung Berikan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kota Metro

13



Kanwil Lampung Berikan Apresiasi Atas Penggagalan Penyelundupan Narkoba di Dalam Lapas

14



Kanwil Lakukan Money Capaian Perjanjian Kinerja TA. 2021 pada Rutan Se-Provinsi Lampung

16



Langkah Kemenkumham dalam Pengendalian Eskalasi Covid-19

18



Apel Pagi Bersama, Plt. Kakanwil Berikan Arahan terkait PPKM Darurat

24



Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Secara Virtual, Sekjen Berikan 13 Arahan

26



Kanwil Lampung Ikuti Rapat Persiapan Verifikasi Dokumen Unggah Penerimaan CPNS di Lingkungan kementerian

28



Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Lampung Laksanakan Rapat Perdana, Bentuk Struktur Organisasi dan Agenda Rapat MPWN

30



PPKM Level 4 di Kota Bandar Lampung, Plt. Kakanwil Ambil Langkah Strategis pada Jaringan

32



Divisi Pemasyarakatan Beserta Seluruh Kepala Upt Pemasyarakatan Lampung Terima Penguatan Tusi Dirkamtib

34



Kanwil Lampung Lakukan Percepatan Integrasi Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Provinsi Lampung

36



Kanwil Lampung Ikuti Sosialisasi Panduan Teknis Audit Kepatuhan Terhadap Notaris dalam Penerapan PMPJ

38



Kanwil Lampung Ikuti Rapat Persamaan Persepsi Terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Berdasarkan PermenPAN RB No. 8 Tahun 2021



Plt. Kakanwil Lampung Resmi Membuka Giat Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2021

Lampung – Kegiatan Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tingkat Wilayah Tahun 2021 resmi dibuka oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Ida Asep Somara pada hari ini, Kamis (01/07). Turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Nur Ichwan, Kepala Divisi Keimigrasian: Is Eko Putranto, Kepala Bagian Umum: Hadiyanto, Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN: Arya Dwijayanti serta para panitia penyelenggara.



Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan menghadirkan para Operator SAIBA dan Simak BMN Satuan

Kerja jajaran Kantor Wilayah Lampung. Sebelum dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Kegiatan ini diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Ketua Panitia,

Hadiyanto. Menurutnya, tujuan kegiatan Pra Rekonsiliasi ini yaitu untuk mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi



Penyampaian materi oleh narasumber dari Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang

Pemerintah Pusat dengan memperhatikan aspek relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami sehingga kita bisa menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah memberikan sambutan dan sekaligus membuka jalannya kegiatan Pra Rekonsiliasi. Dalam sambutannya ia mengingatkan untuk tetap bekerja secara profesional meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid sehingga tugas-tugas serta kewajiban tidak terhambat dengan tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Lebih lanjut Ida mengemukakan bahwa Rekonsiliasi ini memiliki nilai yang sangat penting dan strategis. Karena rekonsiliasi merupakan bagian dari mekanisme dan fasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian/Lembaga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk diketahui, dalam kegiatan Exit Meeting BPK-RI tanggal 28 Juni 2021, sekali lagi Kementerian Hukum dan HAM diumumkan telah meraih opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) selama kurun waktu 6 (enam) tahun berturut-turut.

Menutup sambutan, Ida berharap dengan tersusunnya laporan keuangan yang baik, Kantor Wilayah Lampung dapat memberikan sumbangan positif sehingga Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan opini WTP tahun depan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dibagikan oleh Narasumber Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan, Ahmad Fahmi selaku Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran I dan Andre Parindrianto selaku Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IA serta Narasumber dari Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung, Endi Suhendi

Hari Kedua

Memasuki hari kedua kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tingkat Wilayah Tahun 2021, seluruh Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mendapatkan pendampingan dari Koordinator Tingkat Wilayah

**“Saya menaruh perhatian besar dan sangat berterima kasih atas dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan & BMN Tingkat Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2021 guna tercapainya Laporan Keuangan yang akurat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu serta mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.”
Tutup Ida.**

yang terdiri dari para Staf Sub Bagian Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Lampung. Dengan dihadiri 52 orang peserta yang terdiri dari para Operator SAIBA dan Operator SIMAK-BMN pada masing-masing Satuan Kerja.

Selain itu, terhubung pula melalui virtual dengan para Tim Pendamping Tingkat Pusat yang terdiri dari Biro Keuangan, Biro BMN, Ditjen Imigrasi, Ditjen PAS, Ditjen PP, Ditjen HAM, Ditjen AHU, Ditjen KI, BPHN, serta Balitbang Hukum dan HAM.

Di hari kedua ini Satuan Kerja akan melakukan penyamaan data keuangan dan BMN agar saat dilaksanakan rekonsiliasi di tingkat pusat didapatkan kesamaan data yang sesuai dari semua peserta yang mengikuti kegiatan pra rekon tingkat wilayah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ini berjalan dengan tertib serta menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam sambutannya hari kemarin



Tim Divisi Keimigrasian Lakukan Kegiatan Pembinaan Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian Pada UKK Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi di Kruai

Kamis (01/07/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melalui Tim Divisi Keimigrasian yang dipimpin Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Imam Santoso melaksanakan kegiatan pembinaan kepada para pegawai Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI di Kruai, Pesisir Barat.



Imam Santoso memberikan pengarahan bahwa tugas dan fungsi Divisi Keimigrasian

Selanjutnya, Imam Santoso memberikan pengarahan bahwa tugas dan fungsi Divisi Keimigrasian sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Unit Kerja Kantor Imigrasi sebagai garda terdepan pelayanan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indo-

nesia (WNI) yang berhubungan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu diharapkan dapat selalu memberikan pelayanan yang baik. Dan tentu saja tetap memperhatikan protokol kesehatan, walaupun sejak pandemi covid-19, jumlah pelayanan terus menurun.

Kepada seluruh pegawai harus selalu memberikan pelayanan secara profesional dalam rangka mendukung Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi agar statusnya dapat meningkat menjadi Kelas II, mengingat wilayah kerjanya yang luas, yaitu 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Lampung.

BEACH CLUB



Tim Divisi Keimigrasian Lakukan Kegiatan Penyelidikan dan Intelijen Keimigrasian Pada Wilayah Kerja Kanim Kelas III Non TPI Kotabumi di Kabupaten Pesisir Barat

Rabu (30/06/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melalui Tim Divisi Keimigrasian yang dipimpin oleh Kepala Divisi Keimigrasian: Is Ekoputranto dan Kepala Bidang Inteldakim RA Fatimah serta para Pejabat Pengawas dan Staf melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Orang Asing di Wilayah Pesisir Barat (Kruai) yang merupakan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Non TPI Kelas III Kota Bumi



Tim menuju PT. Coral Samudera Pesisir Barat, dimana tim mendapatkan satu pengunjung yang berkebangsaan Perancis

Selanjutnya Tim menuju ke lokasi pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan di Hometay/ Losmen di Pesisir Barat (Kruai). Menuju Losmen Palm Beach Kruai, pada losmen tersebut tidak terdapat orang asing yang menginap di losmen yang mungkin dikarenakan dengan adanya Pandemi Covid-19.

Selanjutnya Tim menuju PT. Coral Samudera Pesisir Barat, dimana tim mendapatkan 1 (satu) pengunjung yang berkebangsaan Perancis. Disaat Pandemi Covid-19 ini petugas mengingatkan untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan dan Peraturan Keimigrasian yang berlaku untuk ditaati dan dipatuhi.



Kanwil Lampung Berikan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kota Metro

Dalam rangka Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Wilayah Kota Metro, Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebanyak 4 (empat) orang yang diketuai oleh Doni Arianto Raharjo selaku Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH beserta dengan Para Penyuluh Hukum memberikan pembinaan dari Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Aula Kecamatan Metro Pusat. Senin (05/07/2021)



Kegiatan yang rencananya akan digelar di Kota Metro ini terbagi dalam 5 (lima) hari dan dibagi berdasarkan peta wilayah yaitu Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Barat, dan Kecamatan Metro Selatan.

Indrawati Imron selaku Penyuluh Hukum Muda pada Kanwil Kemenkumham Lampung berkesempatan memberikan materi di Wilayah Kecamatan Metro Pusat menjelaskan bahwa tujuan dari program dan kegiatan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat se-

hingga masyarakat menjadi cerdas hukum.

Indrawati Imron menjelaskan bahwa Kelompok Keluarga Sadar Hukum adalah sebagai wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran

hukum bagi dirinya. Tak lupa In-drawati Imron meminta agar evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi.

Selanjutnya, Penyuluh Hukum Muda, Melda Sulastriyawati sebagai pemateri kedua memberikan pemahaman tentang lomba Kadarkum dimana merupakan suatu sarana untuk memilih kelompok kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum dengan materi lomba Kadarkum mencakup perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah.

Menutup Materi, Robi Awaludin yang juga merupakan Penyuluh Hukum Pertama menjelaskan tentang Penyuluhan Hukum melalui Simulasi dengan menggunakan alat peraga. Robi menjelaskan tujuan simulasi ini untuk mempermudah masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hukum, memberikan informasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memotivasi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku.



Tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Lampung memberikan penyuluhan keluarga sadar hukum





Kanwil Lampung Berikan Apresiasi Atas Penggagalan Penyelundupan Narkoba di Dalam Lapas

Sebuah bentuk apresiasi diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Agung karena telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas. Selasa (06/07/2021)

Bertempat di Lapas Kelas IIB Kota Agung, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi secara langsung memberikan penghargaan dan cinderamata kepada 8 (delapan) petugas. Tak lupa Farid juga mengucapkan terimakasih atas loyalitas dan integritas para petugas yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba di dalam Lapas.

Selanjutnya Farid memberikan motivasi, pengarahan dan penguatan kepada seluruh Pegawai di Lapas Kota Agung terkait dengan pencegahan Covid-19



Farid Junaedi secara langsung memberikan penghargaan dan cinderamata kepada 8 (delapan) petugas

yang semakin hari semakin meningkat dan juga anjuran dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sebagai informasi,

Petugas pintu utama (P2U) Lapas Kotaagung menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu pada hari Rabu Tanggal 30 Juni lalu



Kanwil Lakukan Monev Capaian Perjanjian Kinerja TA. 2021 pada Rutan Se-Provinsi Lampung

Upaya memenuhi target Capaian Perjanjian Kinerja 2021 dengan maksimal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakan khususnya Rumah Tahanan Negara (Rutan) jajaran Kanwil Lampung secara Virtual Zoom Meeting. Jumat (09/07/2021)

Kegiatan Monev ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara yang didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali beserta jajarannya. Para peserta yang menjadi sasaran Monev yaitu Divisi Pemasarakan Kanwil Lampung, Rutan Kelas I Bandar Lampung, Rutan Kelas IIB Kotabumi, Rutan Kelas IIB Kota Agung, Rutan Kelas IIB Su-

kadana, Rutan Kelas IIB Menggala, dan Rutan Kelas IIB Krui.

Membuka agenda Monev, Ida Asep menjelaskan bahwa Aplikasi E-Performance merupakan bentuk aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja dari masing-masing Satuan Kerja telah dilaksanakan, dimana E-Performance sendiri diinput oleh masing-masing Satuan Kerja di awal Tahun dengan mengikuti Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM serta Rencana Strategis dari masing-masing Satuan Kerja. Ida Asep mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya E-Performance tetap harus diisi pada akhir Triwulan agar Kinerja yang telah dilaksanakan dapat selalu termonitor.

Selanjutnya Ida Asep menjelaskan tugas Divisi Pemasarakan Kanwil Lampung dapat melakukan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, serta pengendalian untuk mencapai Target sesuai dengan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja di Satuan Kerja jajarannya. Ida Asep mengingatkan agar setiap pelaksanaan pekerjaan harus mengacu

pada Perjanjian Kinerja, hal itu guna untuk mencapai target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja.

Sebelum mengakhiri kegiatan, Ida Asep mengajak seluruh Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pengelola serta Staf pengelola untuk memberikan pendapat serta kendala yang dialami, agar Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Lampung dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan.

Rangkaian Monitoring dan Evaluasi Berlanjut

Meneruskan rangkaian Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021, Kantor Wilayah Lampung melakukan kegiatan pada Lembaga Pemasarakan (Lapas) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung secara Virtual Zoom Meeting. Senin (12/07/2021)

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya Perjanjian Kinerja Tahun 2021 memperoleh hasil yang maksimal. Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara secara langsung memimpin ja-



Narya selaku narasumber di Ditjen Pemasaryakatan menjelaskan tentang definisi indikator pada Perjanjian Kinerja Pemasaryakatan,

lannya Monitoring dan Evaluasi serta pembicara dari Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, Narya. Selain itu Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara bersama dengan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali dan para peserta dari para Kepala Lembaga Pemasaryakatan beserta jajaran Se-Propinsi Lampung

Dalam arahnya, Ida Asep Kembali menjelaskan tentang E-Performance, dimana di dalamnya memiliki 4 (empat) tahapan dalam pembaharuan data, yaitu pada Triwulan I, II, III, IV. Pada

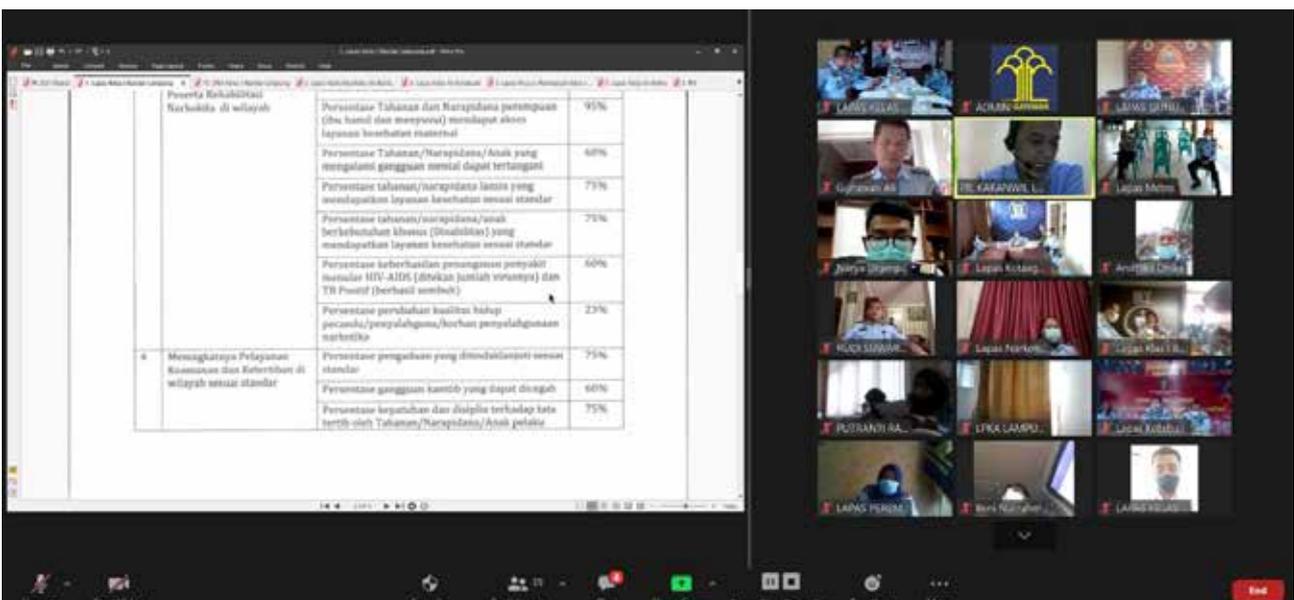
dasarnya berbicara tentang Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani secara berjenjang dari Unit Eselon I hingga ke Satuan Kerja di awal Tahun 2021 harus dapat di tindak lanjuti secara berkelanjutan baik di Kantor Wilayah maupun ke Satuan Kerja.

Selanjutnya, Ida Asep menjelaskan butir-butir kegiatan yang ada pada Perjanjian Kinerja kepada Lembaga Pemasaryakatan, agar dalam menerapkan kinerja bisa menyesuaikan dengan indikator-indikator yang telah ter tuang dalam Perjanjian Kinerja.

Namun demikian Ida Asep meminta penjelasan kepada narasumber dari Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dalam formulasi pengukuran pada Perjanjian Kinerja.

Narya selaku narasumber di Ditjen Pemasaryakatan menanggapi tentang permasalahan-permasalahan yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah dan Satuan Kerja. Narya menjelaskan tentang definisi indikator pada Perjanjian Kinerja Pemasaryakatan, namun untuk formulasi perhitungan sedang dalam pendalaman untuk penyesuaian pada masing-masing direktorat. Untuk E-Performance yang diperhitungkan per-triwulan bertujuan untuk prosesnya dapat terhitung dalam capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Di akhir kegiatan Ida Asep pada prinsipnya mengucapkan terimakasih telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan dalam menjalankan kedepannya. Terakhir Ida Asep berpesan untuk satuan kerja agar terus mempelajari tentang hal-hal yang telah dikerjakan untuk tercapainya Perjanjian Kinerja menjadi sesuai dengan target yang ditentukan.



Monitoring dan Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja diikuti oleh Kepala Lembaga Pemasaryakatan beserta jajaran Se-Propinsi Lampung



Langkah Kemenkumham dalam Pengendalian Eskalasi Covid-19

Angka positif Covid-19 Indonesia mengalami peningkatan tajam selama beberapa minggu terakhir. Semua kalangan masyarakat, baik itu instansi pemerintahan, swasta maupun masyarakat umum turut terdampak pandemi Covid-19 ini.

Merespon peningkatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Revianto segera mengambil langkah-langkah pengendalian untuk memutus penyebaran Covid-19 melalui aktivitas perkantoran di Kemenkumham.

Pada Kamis, 24/06/2021 lalu telah dilakukan tes PCR kepada jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, yakni sebanyak 707 pegawai. Selanjutnya, Sekjen memerintahkan seluruh pegawai Setjen untuk melakukan tes PCR secara mandiri mulai Jumat, 25/06/2021 hingga Kamis, 01/07/2021.

Selain itu, Sekjen juga memerintahkan kepada dokter Balkesmas Kemenkumham untuk melakukan pemberian obat dan vitamin berupa Azitromycin 500mg, Vit D3 5000, Zinc 20 mg, Vit C 1000mg, Ondansetron 4mg, dan Paracetamol 600 mg terhadap pegawai yg terpapar Covid-19. Sekjen Andap kemudian mengajukan permohonan karantina gedung Setjen selama tiga

“Sebagai langkah pengendalian eskalasi Covid 19 khususnya di lingkungan Kemenkumham, Menteri telah memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan tindakan,” ujar Andap melalui keterangan tertulisnya.

hari kerja, Senin 28/06/2021 s.d. Rabu 30/06/2021 untuk sterilisasi gedung dan pencegahan penyebaran Covid-19. Selama masa karantina gedung Setjen, Sekjen

menetapkan hanya dua orang pegawai dari setiap biro dan Pusdatin yang melaksanakan work from office (wfo) hingga Kamis, 01/07/2021 dengan waktu kerja pukul 09.00 – 12.00 WIB. Ruang kerja yang dipakai adalah Graha Pengayoman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut Andap, situasi pandemi Covid-19 ini harus disikapi dengan bijaksana, khususnya terkait pengurangan aktivitas dan mobilitas di luar rumah.

“Perlu dipahami bahwa kita harus bijak dalam beraktivitas, khususnya ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih baik dirumah saja jika tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak,” tutur Andap.

“Apabila keluar rumah, agar diperhitungkan risiko penularan, baik pada titik tempat tujuan, dan juga dari tempat tujuan kembali ke rumah. Perhatikan kerentanan anggota keluarga yang ada di rumah,” tambahnya.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Indonesia, Sekjen Kemenkumham mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SEK-11.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Ketentuan PPKM Darurat di Lingkungan Kemenkumham. SE tersebut mengatur agar seluruh jajaran Kemenkumham di Pulau Jawa dan Bali 100% melakukan pekerjaan dari rumah (wfh), sedangkan pelaksanaan kerja di luar Pulau Jawa dan Bali dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan satgas Covid-19 daerah setempat.

Sekjen menetapkan agar para pimpinan Unit Eselon I yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan menyelenggarakan pelayanan publik agar menyusun pedoman kerja pada masa PPKM darurat.



“Jajaran Kemenkumham harus mendukung dan melaksanakan sepenuhnya kebijakan PPKM darurat, serta siapkan secara matang langkah dan upaya dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 pada satuan kerja di daerahnya masing-masing,” himbau Sekjen.

Selain itu, Sekjen mengeluarkan SE Nomor SEK-12.OT.02.02 TAHUN 2021 Tentang Ketentuan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha Serta Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/ 2021 M selama masa PPKM darurat.

Guna efektivitas pelaksanaan kedua SE, Sekjen memerintahkan kepada seluruh Pimpinan Unit Eselon 1, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala UPT untuk melaporkan hasil implementasi SE kepada Menteri Hukum dan HAM dengan tembusan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

Perkembangan pengendalian Covid-19 di lingkungan Kemenkumham dilaporkan secara rutin oleh Sekjen kepada Menkumham.

Sekjen juga rutin mengawasi dan menyapa jajaran Sekretariat Jenderal untuk selalu waspada, menjalankan protokol kesehatan, isolasi mandiri secara ketat dan melakukan olah raga.

“Penting untuk diingat keberhasilan pengetatan aktivitas ini sangat ditentukan oleh kontribusi, sinergi dan kolaborasi kita semua, baik internal maupun secara eksternal dengan pihak lain. Prioritas utama saat ini, semoga kita semua tetap sehat, aman dari Covid-19 dan tetap produktif,” tutur Sekjen.



Apel Pagi Bersama, Plt. Kakanwil Berikan Arahan terkait PPKM Darurat

Senin (12/07/2021) Plt. Kakanwil Kemenkumham Lampung, Ida Asep Somara memberikan pengarahannya terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Apel Pagi Bersama secara virtual yang diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Administrator dan seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung.

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/175/SET.M.E-KON.3/07/2021, Bandar Lampung menjadi salah satu kota yang ditetapkan untuk menerapkan PPKM Darurat yang berlaku pada 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Langkah tersebut bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Ida Asep dalam pengarahannya

menjelaskan sesuai Instruksi Gubernur Lampung No 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro bahwa Kota Bandar Lampung ditetapkan kriteria situasi pandemi level 4 pada kondisi darurat dan Kota Metro ditetapkan kriteria situasi pandemi level 4 pada kondisi diperketat.

“Untuk kegiatan perkantoran pada Kriteria PPKM Darurat diberlakukan WFH 100 % mulai hari ini, yang dalam hal ini Kantor Wilayah, Bapas Kelas I Bandar Lampung dan Kanim Kelas I Bandar Lampung sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Sedangkan Untuk UPT Pemasarakatan dapat mengatur Work from Home bagi pegawai yang tugasnya tidak langsung memberikan layanan publik,” ujar Ida Asep

Arahan untuk Kalapas maupun Karutan selama pemberlakuan PPKM Darurat juga disampaikan oleh Ida Asep seperti tidak menerima kunjungan dari pihak manapun yang berhubungan langsung dengan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP), Seluruh petugas di Lapas dan Rutan

untuk tidak melakukan kontak erat dengan WBP guna memastikan kondisi Warga Binaan dalam keadaan steril, Tidak ada pemindahan narapidana antar UPT serta meminta Kalapas/Karutan membuat langkah-langkah pencegahan dan antisipasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Ida Asep berpesan kepada seluruh jajaran baik yang WFH maupun WFO untuk meluangkan waktu guna mempelajari kebijakan penanganan pandemi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari internal kementerian Hukum dan HAM sendiri.

“Jangan sampai terjadi dan melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan,” jelas Ida Asep.

Menutup arahnya, Ida Asep mengajak seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatan masing-masing baik di lingkungan kerja maupun lingkungan keluarga serta senantiasa mematuhi protokol Kesehatan



Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran

Data per 28 Juli 2021 pada laman covid19.go.id, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat

menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM. Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus



Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.

memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

nomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.



“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan eko-



Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam

bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu. "Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi," kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presi-

den Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro. "Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain," ucap Yasonna.

"Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19," kata Laoly. "Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran," tutupnya. Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selain terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan

yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

"Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi," tutupnya.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini," kata Andap. "Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat," lanjutnya.





Kanwil Lampung Sebar 880 Paket Bantuan Sosial di 5 Wilayah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Bakti Sosial Kumham Peduli, Kumham Berbagi bertema “Bakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19” kepada masyarakat dan ASN yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara serentak dilaksanakan di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia. Jumat (30/07/2021)





Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, memberikan paket bantuan sosial kepada warga kelurahan Sumur Putri



Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Eko Putranto, memberikan paket bantuan sosial kepada warga kelurahan Sumur Putri



Kepala Bagian Umum, Hadiyanto memberikan paket bantuan sosial kepada warga kelurahan Sumur Putri

Secara terpusat, Kegiatan Bakti Sosial bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly melaksanakan penyerahan secara simbolis kepada masyarakat dan ASN di Lapangan Upacara Kantor Kemenkumham, Jakarta pada kemarin, Kamis (29/07). Kegiatan Bakti Sosial ini juga diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM melalui Virtual Zoom Meeting atau secara live melalui live.kemenkumham.go.id

Kantor Wilayah Lampung mengambil andil dalam Kegiatan Bakti Sosial, Kepala Divisi Pemasaryahatan, Farid Junaedi, Kepala Divisi Keimigrasian, Is Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan dan Kepala Bagian Umum, Hadiyanto memberikan paket bantuan social secara simbolis kepada masyarakat yang dalam hal ini Ketua Rukun Tetangga 02, 03, 04 pada Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung yang berada di sekitar Kantor Wilayah Lampung dan ASN/Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Lampung. Turut hadir juga Kepala Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kepala Kelurahan Sumur Putri dalam Kegiatan Bakti Sosial.

Kegiatan Bakti Sosial yang di Lingkungan Kantor Wilayah ini terbagi menjadi 5 titik Wilayah Kabupaten dan Kota yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Utara dimana masing-masing wilayah ditunjuk Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Lampung untuk proses pembagian Paket Bantuan Sosial. Harapannya Paket Bantuan Sosial yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang khususnya terdampak langsung dengan adanya pandemi Covid-19.



Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Secara Virtual, Sekjen Berikan 13 Arahan

Dalam rangka Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kantor Wilayah Semester I Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan secara Virtual Zoom Meeting pada kediaman masing-masing. Rabu (14/07/2021)



Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM secara Virtual



Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho Dewanto memberikan laporan kegiatan

Bertempat dikediamannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM secara Virtual

Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI, Wisnu Nugroho Dewanto memberikan laporan kegiatan yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini sebagai wujud pelaksanaan tugas yang diamanatkan pada Undang-Undang, yaitu guna mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.

Wisnu Nugroho secara terperinci menjelaskan tujuan dari kegiatan yaitu untuk menyamakan nilai pada neraca SAIBA dan SIMAK BMN, Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memberikan keyakinan, akurasi dan keandalan atas in-

formasi, memastikan pencatatan dan penyajian transaksi dengan berbasis AKRUAL, serta mengupayakan tetap mempertahankan OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selanjutnya, pengarahan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Andap Budhi Revianto menjelaskan bahwa rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN diselenggarakan guna menyamakan antara Laporan Keuangan, Laporan BMN dengan KPPN dan KPKNL, Sesuaikan pencatatan didasar dokumen sumber dan transaksi, Optimalisasi Sistem Wasdal Internal atas Pengelolaan Kas, Pendapatan dan Belanja Barang dan Jasa serta penyusunan Laporan Keuangan, Laksanakan Wastib Aset Tetap tak Berwujud (ATB) serta Opname Fisik serta Lakukan pemantauan Data Laporan Keuangan dan BMN secara berjenjang.

Andap Budhi memberikan atensi terkait dengan 13 Arahan Sekretaris Jenderal yaitu terkait dengan Capaian Kinerja, Covid-19, Work From Home, Pelayanan Publik Digital, Tindak Lanjut Temuan BPK, Refocusing Anggaran, WBK/WBBM, Penerimaan Calon Taruna dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Oknum Bermasalah, Manajemen Media, Laporan Kepala Kantor Wilayah, Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022, serta Rencana Kontijensi dan Langkah Kontijensi



Kanwil Lampung Ikuti Rapat Persiapan Verifikasi Dokumen Unggah Penerimaan CPNS di Lingkungan kemenkumham

Kamis (15/07/2021) Sejak awal Bulan Juli 2021, Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021. Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 716 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021

Dalam hal ini melalui Virtual Zoom Meeting, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melakukan Rapat Persiapan Verifikasi Dokumen Unggah



Andap Budhi Revianto selaku Sekretaris Jenderal Kemenkumham membuka jalannya rapat sekaligus memberi arahan

Penerimaan CPNS. Andap Budhi Revianto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM membuka jalannya rapat sekaligus memberi arahan. Dari menjelaskan tentang Timeline Penerimaan CPNS serta Permasalahan dalam Seleksi CPNS di Tahun yang lalu.

Andap memberikan atensi kepada Seluruh jajaran harus mampu memahami aturan dan persyaratan dalam Seleksi, me-

laksanakan verifikasi dengan teliti, rahasia, dan tanggung jawab. Tak Lupa Komjen Pol. Andap meminta dalam pelaksanaan selesai bersikap secara Profesional serta bersih, obyektif, sesuai dengan aturan, dan humanis.

Andap meminta kepada seluruh Jajarannya agar dapat memonitor pelaksanaan dan setiap perkembangan di masing-masing wilayah kerja agar dalam pelak-

sanaan seleksi CPNS Tahun 2021 menjadi bersih dan transparan.

Selanjutnya, Kepala Biro Kepegawaian, Sutrisno menjelaskan bahwa Jumlah Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Kemenkumham Pada Tahun 2021 berjumlah 4558 dimana terbagi dalam 44 Unit Pusat dan 4514 Kantor Wilayah. Penerimaan dibagi pula dari lulusan SLTA, D-III, S-I, S-II dengan formasi Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus (Lulusan terbaik, Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat).

Di waktu yang sama, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara Bersama dengan Kepala Bagian Umum, Hadiyanto, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT, Yulinar Trisia beserta jajarannya turut mengikuti jalannya rapat di kediaman masing-masing.

Ambil Keputusan dengan Tepat dan Pasti

Memasuki hari kedua Verifikasi Berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tim Verifikator Kantor Wilayah Lampung mendapatkan arahan dari Kepala Bagian Umum, Hadiyanto secara Virtual Zoom Meeting. Sabtu (17/07/2021)

Verifikasi dokumen atau berkas CPNS Tahun 2021 ini telah dimulai sejak 16 Juli dan akan berakhir hingga 31 Juli 2021. Tim Verifikator Kanwil Lampung yang berjumlah 23 pegawai, kemarin (16/07), telah memverifikasi berkas sebanyak 322 berkas. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan RT, Yulinar Trisia melaporkan bahwa target hari ini masing-masing verifikator memverifikasi 100 berkas.

Tak lupa Yulinar memberikan semangat kepada jajarannya, "tetap semangat untuk teman-teman semua, walaupun kita hanya bertemu secara virtual" Ujar Yulinar.

Selanjutnya, Hadiyanto mengingatkan kepada seluruh Tim Ve-



Hadiyanto mengingatkan kepada seluruh Tim Verifikator untuk saling mengingatkan dalam kesesuaian persyaratan dan yang diunggah para peserta



Tim Verivikator menyimak arahan dari Kepala Bagian Umum, Hadiyanto

rikator untuk saling mengingatkan dalam kesesuaian persyaratan dan yang diunggah para peserta.

"jangan sampai persyaratan yang ada terlewatkan, untuk itu verifikator harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan pasti." Tegas Kabag Umum.

Terkait dengan kendala-kendala yang mungkin tidak terselesaikan Hadiyanto meminta untuk segera berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal (Unit Eselon I). Hadiyanto juga meminta untuk Tim Verifikator untuk menjaga nama baik Kantor Wilayah Lampung dengan menghindari kesalahan dalam proses verifikasi.

Terakhir, Hadiyanto meminta agar kegiatan Verifikasi Berkas

dapat termonitor dan terkontrol oleh Pimpinan dalam perkembangannya untuk dibuatkan laporan secara berjenjang.

"Berikan laporan secara berkelanjutan dan up-to-date, lengkap dengan menyertakan update berkas yang terus berjalan, jumlah yang sudah terverifikasi, jumlah lulus dan jumlah gugur"
pungkas Hadiyanto



Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Lampung Laksanakan Rapat Perdana, Bentuk Struktur Organisasi dan Agenda Rapat MPWN

Dalam rangka pembentukan Struktur Organisasi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sebagai instansi Pembina memfasilitasi Rapat Internal secara Virtual Zoom Meeting. Rabu (21/07/2021)

Kegiatan ini dihadiri seluruh Anggota MPWN dan Tim Sekretariat MPW, hadir juga Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara yang juga selaku Ketua MPW Notaris Provinsi Lampung, selain perkenalan Ida juga menyampaikan agar MPWN dalam Pengambilan keputusan atas rekomendasi dari MPDN atau Keputusan yang bersifat Administrasi, MPWN harus berlandaskan peraturan yang berlaku baik merujuk kepada Undang Undang Tentang Jabatan Notaris Maupun Peraturan Menteri terkait Tugas Pokok Fungsi MPWN.

**“Jangan sampai Langkah-langkah yang diambil tidak ada payung hukum yang kemudian hari dapat menjadikan masalah pada notaris”
Ujar Ida.**



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan memimpin jalannya rapat



Wakil Ketua MPWN Propinsi Lampung disepakati oleh Para Anggota menunjuk Bapak Reza Berawi yang berasal dari unsur Notaris

“Jangan sampai Langkah-langkah yang diambil tidak ada payung hukum yang kemudian hari dapat menjadikan masalah pada notaris” Ujar Ida.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar selaku Moderator dalam Rapat Perdana ini mempersilahkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan untuk memimpin jalannya rapat. Dalam penyampaiannya Nur Ichwan mengusulkan kepada MPW Notaris Prov. Lampung agar secara berkelanjutan meng-

adakan Rapat Rutin Bulanan yang bertujuan agar persoalan-persoalan yang menjadi Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat diorganisir dan diselesaikan dengan baik.

Nur Ichwan menyampaikan bahwa untuk pemilihan Ketua MPW Notaris Provinsi sesuai dengan Permenkumham terbaru bahwa kedudukan Plt. Kepala Kantor Wilayah sebagai Ex-Officio Ketua MPW Notaris, sedangkan untuk penunjukan Sekretaris MPWN telah diambil keputusan

Nur Ichwan menyampaikan bahwa untuk pemilihan Ketua MPW Notaris Provinsi sesuai dengan Permenkumham terbaru bahwa kedudukan Plt. Kepala Kantor Wilayah sebagai Ex-Officio Ketua MPW Notaris, sedangkan untuk penunjukan Sekretaris MPWN telah diambil keputusan dengan menunjuk saudari Dina Ismela dari Unsur Pemerintah.

dengan menunjuk saudari Dina Ismela dari Unsur Pemerintah.

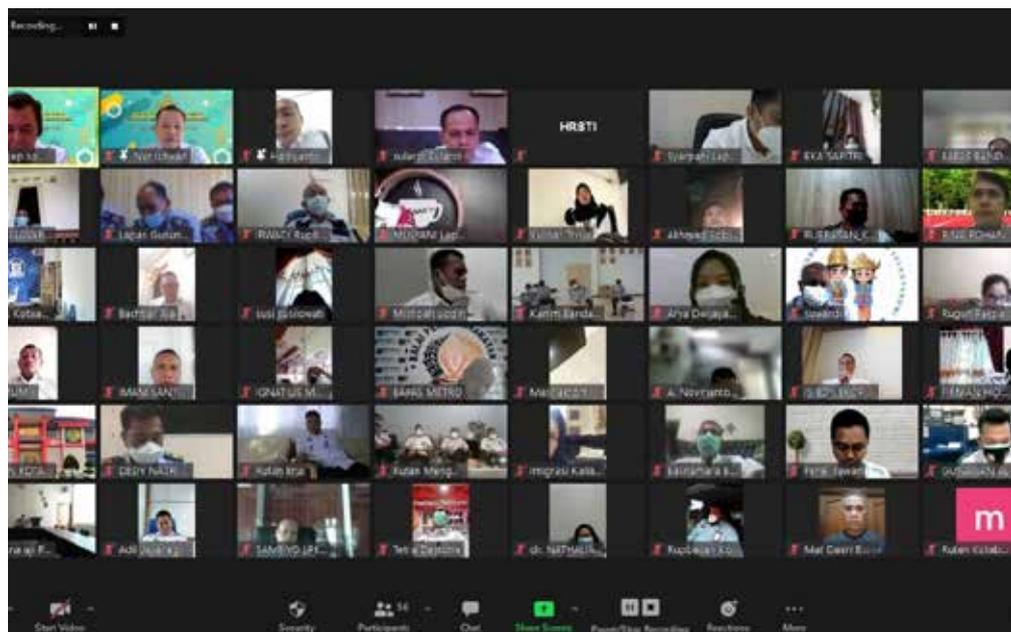
Dalam Rapat pembentukan Struktur Organisasi MPWN yang berlangsung secara Virtual ini, untuk Wakil Ketua MPWN Propinsi Lampung disepakati oleh Para Anggota menunjuk Bapak Reza Berawi yang berasal dari unsur Notaris.

Diakhir Rapat ini seluruh anggota sepakat menyetujui usulan untuk mengadakan Rapat Rutin Bulanan dan Pembentukan Struktur Organisasi MPWN Propinsi Periode 2021 - 2024. Menutup Kegiatan, Ida Asep Somara meminta kepada seluruh pengurus maupun anggota MPW Notaris Provinsi Lampung dapat menjaga nama baik MPW Notaris Provinsi Lampung serta mengajak untuk seluruh pengurus maupun anggota selalu berkomunikasi dengan baik.



PPKM Level 4 di Kota Bandar Lampung, Plt. Kakanwil Ambil Langkah Strategis pada Jajaran

Rabu (21/07/2021) Dalam Upaya Penanganan Penyebaran Covid-19 dimana Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung mengalami situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara memberikan pengarahannya dan petunjuk serta Langkah Strategis Penanganan Covid-19 di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung.





Melalui Virtual Zoom Meeting, Kegiatan ini dihadiri oleh Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan juga mengundang Seluruh Kepala UPT

Kegiatan ini didasari oleh Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Tentang Perpanjangan pemberlakuan PPKM di Lingkungan Kemenkumham Wilayah Jawa-Bali dan 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan Instruksi Gubernur Lampung Tentang Perpanjang-

an Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung.

Melalui Virtual Zoom Meeting, Kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Umum, Hadiyanto serta dihadiri oleh Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Lingkungan Kanwil Lampung dan juga mengundang Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kanwil Lampung.

Ida Asep memberikan arahan agar Satuan kerja yang berada di Bandar Lampung agar melaksanakan Work From Home (WFH) 100% hingga tanggal 25 Juli 2021.

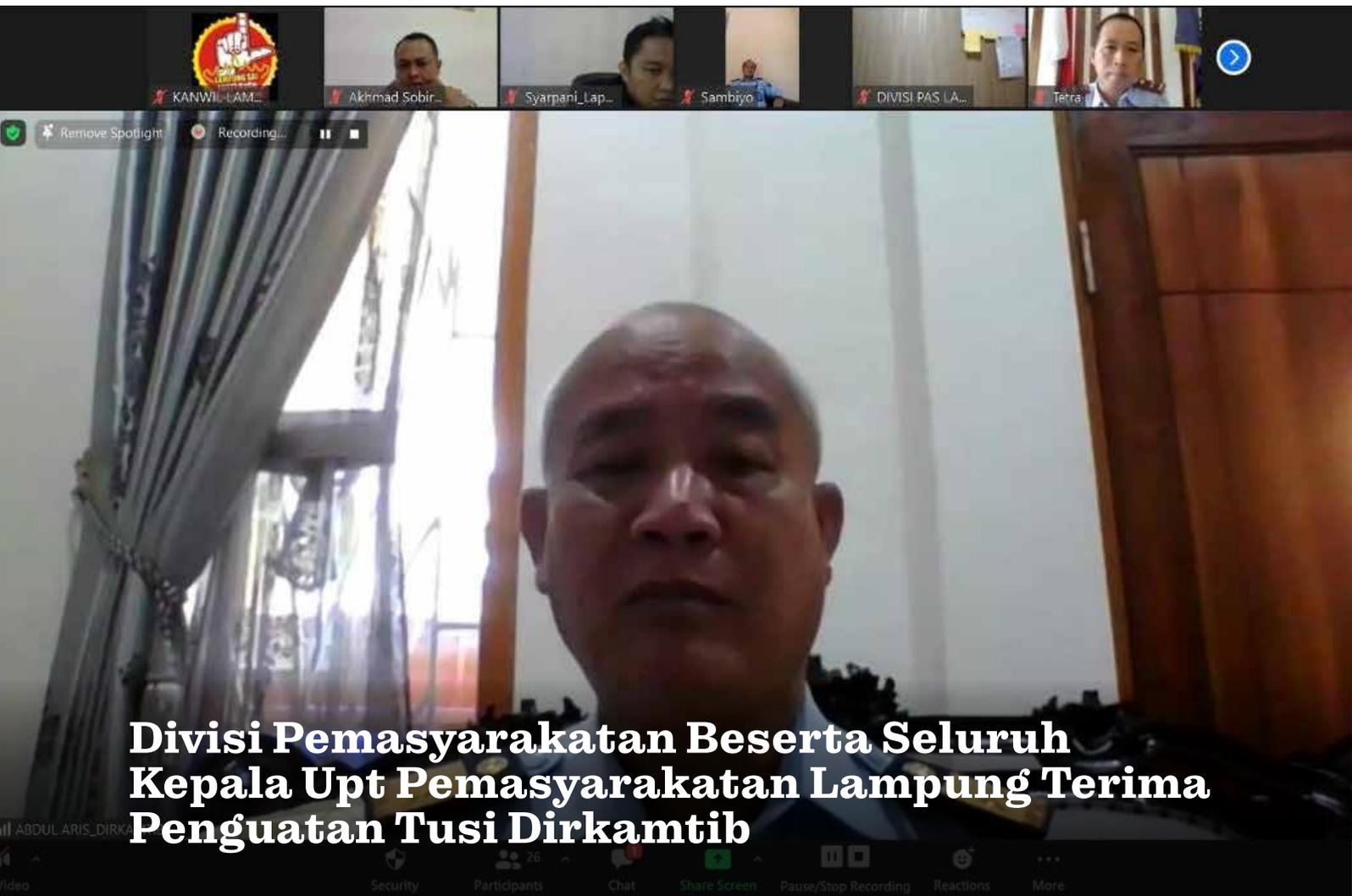
Hal ini guna untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Lingkungan Lapas dan Rutan. Tak lupa Ida menegaskan untuk Kegiatan Kemandirian yang ada di dalam Lapas maupun Rutan agar ditunda sementara, namun apabila terdapat kegiatan yang urgent agar segera mengambil Tindakan secara bijaksana.

Dalam Arahannya juga, Ida menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan mengadakan Bakti Sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 de-

“Untuk Satuan Kerja Lembaga Masyarakat (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) agar menghindari kontak langsung dengan Warga Binaan masyarakat” tegas ida.

ngan membagikan sebanyak 500 paket untuk yang membutuhkan. Namun demikian kiranya pemberian bantuan dapat dilakukan pendataan terkait data penerima sehingga nantinya dapat tepat sasaran, dan agendanya akan dilaksanakan sebelum minggu Kedua Bulan Agustus. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan memberikan tanggapan terkait arahan Bakti Sosial. Nur Ichwan mengungkapkan dalam kegiatan bakti sosial yang rencananya akan dilaksanakan serentak ini akan dikoordinasikan juga dengan para notaris.

Dalam penjelasannya, Ida Asep mengungkapkan PPKM Darurat di Kota Bandar Lampung berada di Level 4. “Lampung menyumbang 1% kasus terkonfirmasi Covid-19 sejumlah kurang lebih 29.000 Jiwa, dimana 72% masih terkonfirmasi positif, dan 4,4% angka kematiannya” terang Ida.



Divisi Pemasyarakatan Beserta Seluruh Kepala Upt Pemasyarakatan Lampung Terima Penguatan Tusi Dirkamtib

Divisi Pemasyarakatan beserta Kepala UPT di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengundang Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pas secara virtual pada hari ini, Selasa (27/07/2021)

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi dan dihadiri oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Kadiv Pas meminta Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan, Abdul Aris dapat



Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi membuka jalannya kegiatan

memberikan motivasi dan penguatan perihal tugas dan fungsi pengamanan serta info terkini Pemasyarakatan .

Pada kesempatan ini, Dirkamtib menyampaikan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan kunci sukses pemasyarakatan. Untuk itu kewaspadaan dan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban perlu dilakukan untuk melakukan tindak pencegahan dan penanganan masalah yang tepat. Terlebih pada masa pandemi ini, kasus pengrebean terkait covid, Warga binaan yang kabur, kegagalan penyelundupan narkoba, dan dokumentasi permasalahan lama tentang pejabat pemasyarakatan yg terjerat narkoba akhir-akhir ini menjadi viral di media sosial dan mencoreng nama pemasyarakatan. Dirjen Pemasyarakatan juga menegaskan untuk tidak mentolerir segala bentuk keterlibatan pegawai pemasyarakatan dalam Kasus narkoba. Selain itu, pemberitaan negatif yang dapat mencoreng nama Pemasyarakatan juga

harus lebih diperhatikan.

Dirkamtib juga mengingatkan untuk tidak menganggap remeh warga binaan dan selalu meningkatkan kewaspadaan petugas UPT. Melakukan inventaris barang yang keluar dan masuk UPT untuk menghindari terjadinya kehilangan barang yang dapat berpotensi mengganggu keamanan seperti peralatan tukang dan lain sebagainya. Meskipun harus waspada, bukan berarti tidak memberikan pelayanan yang baik bagi warga binaan. Pelayanan terhadap warga binaan seperti makanan yang layak, fasilitas pengobatan, remisi, asimilasi, dan pelayanan lainnya juga harus dipastikan baik.

Untuk memastikan kualitas pelayanan makan warga binaan, Kepala UPT dapat langsung melakukan tinjauan dapur dan memeriksa apakah makanan yang akan dibagikan layak dan sehat. Peralatan makan juga harus dipastikan bersih. Bagi warga binaan yang sakit, petugas UPT juga harus memberikan pelayanan

pengobatan yang layak, jika perlu dirujuk ke Rumah Sakit dengan tetap mengutamakan protokol keamanan seperti penjagaan dan borgol. Selain pelayanan - pelayanan diatas, pelayanan seperti remisi dan asimilasi juga harus dipastikan tepat perhitungannya. Dirkamtib berpesan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh warga binaan tanpa diskriminasi.

Dirkamtib juga memberikan apresiasi kepada Div Pas dan UPT Lampung karena telah aktif melakukan pemeriksaan dan terus melakukan tindak antisipasi sehingga pemberitaan miring berkurang. Selanjutnya, diharapkan Div Pas dan UPT Lampung dapat terus meningkatkan kinerja dan berkolaborasi untuk saling support dalam menjaga nama baik Pemasyarakatan. Dalam berkolaborasi, diharapkan masing-masing pihak dapat meredakan ego sektoral dan meningkatkan komunikasi. Sehingga Pemasyarakatan Lampung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat lebih baik lagi.



Kegiatan dihadiri oleh seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung



Kanwil Lampung Lakukan Percepatan Integrasi Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Provinsi Lampung

Digelar secara virtual melalui aplikasi zoom, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung lakukan percepatan integrasi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di provinsi Lampung pada Jumat(30/07/2021). Kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat proses pengintegrasian anggota JDIH di setiap daerah Lampung



Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Kapusdok) Drs. Yasmon, M.L.S memberikan pemaparan kepada para peserta



Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan dengan peserta berjumlah 24 orang yang berasal dari Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung, Setwan DPRD Lampung Selatan, Setwan DPRD Lampung Utara, Setwan DPRD Lampung Timur; Setwan DPRD Tanggamus, Setwan DPRD Pesawaran, Setwan DPRD Tulang Bawang, Setwan DPRD Mesuji, Setwan DPRD Lampung Tengah. Hadir sebagai narasumber adalah Kepala JDIH Nasional, Yasmon.

Proses Percepatan Integrasi Pada Anggota JDIH yang belum terintegrasi ini akan dibantu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam pembuatan website dan aplikasi ILDIS (Indonesian Legal Documentation and Information System) sehingga dapat se-

gera terintegrasi dengan JDIHN, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan JDIH.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah, dan cepat sebagai tujuan terlaksananya Integrasi Informasi Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum (JDIH) dengan seluruh Anggota JDIH baik Institusi, DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota, PTN/PTS di Provinsi Lampung.

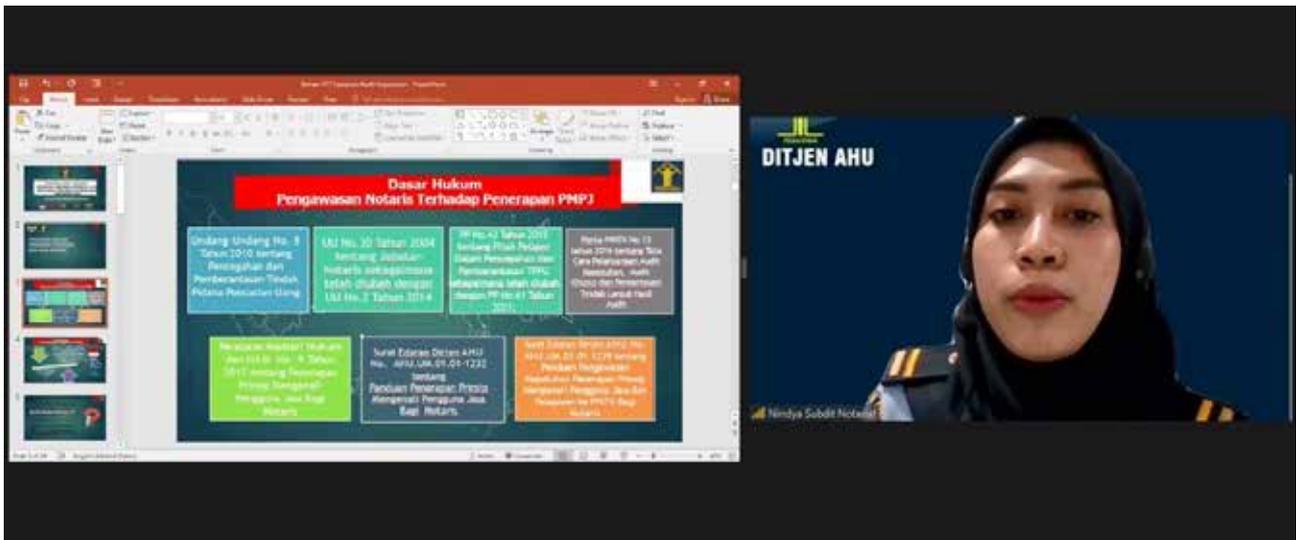
Proses Percepatan Integrasi Pada Anggota JDIH yang belum terintegrasi ini akan dibantu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam pembuatan website dan aplikasi ILDIS (Indonesian Legal Documentation and Information System) sehingga dapat segera terintegrasi dengan JDIHN



Kanwil Lampung Ikuti Sosialisasi Panduan Teknis Audit Kepatuhan Terhadap Notaris dalam Penerapan PMPJ

Digelar secara virtual melalui aplikasi zoom, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan percepatan integrasi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di provinsi Lampung pada Jumat(30/07/2021). Kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat proses pengintegrasian anggota JDIH di setiap daerah Lampung





Nindya Indah Harista selaku Analis Hukum pada Direktorat Jenderal AHU yang menyampaikan Materi Terkait Panduan Teknis Audit kepatuhan Secara Langsung (On Site)



Membuka kegiatan secara langsung, Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU, Santun M Siregar menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wajib melakukan audit kepatuhan langsung (on-site) kepada Notaris yang berisiko sangat tinggi dan atau tinggi berdasarkan hasil analisis risiko yang telah diterima. Santun M Siregar juga menjelaskan bahwa Kantor Wilayah agar bertanggung jawab atas pelaksanaan audit terhadap notaris.

Dilanjutkan oleh materi dari Nindya Indah Harista selaku Analis Hukum pada Direktorat Jenderal AHU yang menyampaikan Materi Terkait Panduan Teknis Audit kepatuhan Secara Langsung (On Site) Menjelaskan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa bagi Notaris memiliki maksud dan tujuan untuk Mengevaluasi kecukupan, efektivitas, dan kepatuhan Notaris dalam menerapkan ketentuan UU TPPU/TPPT, Mendorong Notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif dan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, serta Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menerapkan UU PP TPPU dan UU PP TPPT.

Nindya menjelaskan 2 (dua) faktor yang menerapkan Ketentu-

"Audit Kepatuhan ini menjadi upaya pencegahan agar Notaris sebagai sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan bisa dihindari," ujar Nindya

an UU TPPU/TPPT yaitu Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa (PMPJ) dan Pelaporan Transaksi kepada PPAK.

Turut mengikuti Kegiatan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung secara Virtual Zoom Meeting, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar TS, Kepala Sub Bidang AHU, Hidayatullah Islamy serta para Fungsional jajarannya.



Kanwil Lampung Ikuti Rapat Persamaan Persepsi Terkait Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Berdasarkan PermenPAN RB No. 8 Tahun 2021

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengadakan Kegiatan Persamaan Persepsi terkait dengan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 yang digelar secara Virtual Zoom Meeting dengan Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kamis (22/07/2021)



Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenkumham, Sutrisno membuka acara sekaligus menyampaikan mengenai penyusunan SKP sesuai dengan Peraturan Menpan RB No. 8 Tahun 2021.



Di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Hadir secara langsung Plt. Kepala Kantor Wilayah, Ida Asep Somara, didampingi dengan Kepala Bagian Umum, Hadiyanto, Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

TU, dan RT, Yulinar Trisia, serta para Fungsional Analis Kepegawaian dan Fungsional umum jajarannya.

Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenkumham, Sutrisno

membuka acara sekaligus menyampaikan mengenai penyusunan SKP sesuai dengan Peraturan Menpan RB No. 8 Tahun 2021. Sutrisno menyampaikan 4 (empat) poin utama yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja pemantauan kinerja pembinaan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut.

Dilanjutkan materi oleh A. Yudi Wicaksono selaku Analis Kebijakan Ahli Madya menyampaikan Proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pe-

Sutrisno juga menyampaikan bahwa Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil merupakan hal penting dalam pengembangan karir, manajemen talenta, tunjangan kinerja, penghargaan, dan juga sanksi.

gawai dan perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan kewajiban yang dapat menghasilkan Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Yudi juga menjelaskan bahwa SKP yang telah diisi dengan rencana pelaksanaan kegiatan Tugas Jabatan dan target yang secara keseluruhan telah disepakati, pada akhir tahun digunakan sebagai ukuran penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Kegiatan ditutup dengan diskusi antara peserta dengan narasumber, yang tampak sangat antusias dengan membahas hal terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021

bangga
melayani
bangsa

KAMI ASN KEMENKUMHAM BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

➤ Berorientasi Pelayanan

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Ramah, Cekatan, Solutif dan dapat Diandalkan.
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

➤ Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

➤ Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

➤ Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

➤ Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi & Negara.
3. Menjaga Rahasia jabatan & negara.

➤ Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
2. Terus berinovasi & mengembangkan kreativitas.
3. Bertindak proaktif.

➤ Kolaboratif

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



7 KARAKTER PRIBADI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN ORGANISASI

1. Bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT dan rakyat
2. Meyakini selalu diawasi Allah SWT dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan dan berbuat buruk pasti dibalas keburukan
3. Semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan layanan
4. Hidup sederhana dengan *take home pay* yang halal
5. Mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta
6. Merespon semua keberhasilan dengan syukur dan rendah hati
7. Menyikapi kegagalan dengan berfikir positif tentang hikmah sembari mencari solusi tepat



RAZILU

INSPEKTUR JENDERAL KEMENKUMHAM RI

AYO LAWAN COVID-19

TERAPKAN
PROTOKOL
KESEHATAN

5M!



Mencuci
Tangan



Memakai
Masker



Menjaga
Jarak



Menjauhi
Kerumunan



Mengurangi
Mobilitas